

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Hubungan Pusat Dan Daerah
KODE MK	:	3KKBP209
SEMESTER	:	4

Tim Penyusun:

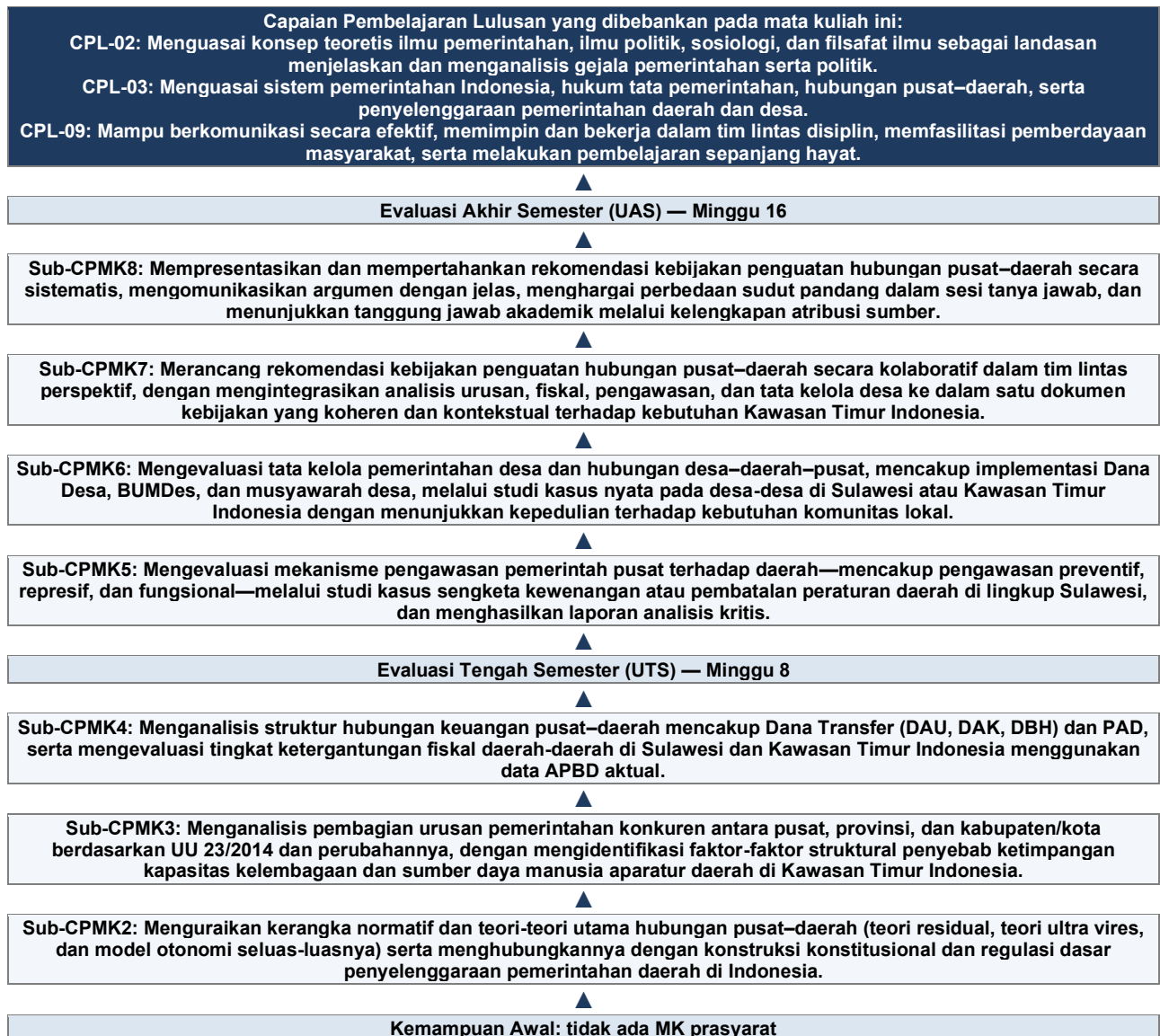
Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKBP209	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hubungan Pusat Dan Daerah		3KKBP209	MKWP	T=3	P=0	4	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307	 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Menguasai konsep teoretis ilmu pemerintahan, ilmu politik, sosiologi, dan filsafat ilmu sebagai landasan menjelaskan dan menganalisis gejala pemerintahan serta politik.					
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-09	Mampu berkomunikasi secara efektif, memimpin dan bekerja dalam tim lintas disiplin, memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembelajaran sepanjang hayat.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan kerangka normatif hubungan pusat–daerah (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan) beserta landasan filosofis dan historis penyelenggaraannya dalam sistem pemerintahan Indonesia.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika pembagian urusan pemerintahan, kewenangan, dan sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan regulasi yang berlaku (UU 23/2014 dan perubahannya) dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketimpangan kapasitas daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.					
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengevaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa—mencakup mekanisme pengawasan pusat terhadap daerah, hubungan keuangan daerah, serta tata kelola pemerintahan desa—melalui studi kasus nyata di lingkup Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia, dan menghasilkan laporan analisis kritis yang didukung minimal dua sumber regulasi dan dua referensi akademik.					

	CPMK4	Mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan rekomendasi kebijakan penguatan hubungan pusat–daerah secara kolaboratif dalam tim lintas perspektif, dengan mengomunikasikan argumen secara sistematis, menghargai perbedaan sudut pandang, dan menunjukkan tanggung jawab akademik serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat daerah.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta menelusuri landasan filosofis dan perkembangan historis hubungan pusat–daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak era kolonial hingga reformasi.			
	Sub-CPMK2	Menguraikan kerangka normatif dan teori-teori utama hubungan pusat–daerah (teori residual, teori ultra vires, dan model otonomi seluas-luasnya) serta menghubungkannya dengan konstruksi konstitusional dan regulasi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014 dan perubahannya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor struktural penyebab ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur daerah di Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK4	Menganalisis struktur hubungan keuangan pusat–daerah mencakup Dana Transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD, serta mengevaluasi tingkat ketergantungan fiskal daerah-daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia menggunakan data APBD aktual.			
	Sub-CPMK5	Mengevaluasi mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah—mencakup pengawasan preventif, represif, dan fungsional—melalui studi kasus sengketa kewenangan atau pembatalan peraturan daerah di lingkup Sulawesi, dan menghasilkan laporan analisis kritis.			
	Sub-CPMK6	Mengevaluasi tata kelola pemerintahan desa dan hubungan desa–daerah–pusat, mencakup implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa, melalui studi kasus nyata pada desa-desa di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia dengan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan komunitas lokal.			
	Sub-CPMK7	Merancang rekomendasi kebijakan penguatan hubungan pusat–daerah secara kolaboratif dalam tim lintas perspektif, dengan mengintegrasikan analisis urusan, fiskal, pengawasan, dan tata kelola desa ke dalam satu dokumen kebijakan yang koheren dan kontekstual terhadap kebutuhan Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK8	Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan hubungan pusat–daerah secara sistematis, mengomunikasikan argumen dengan jelas, menghargai perbedaan sudut pandang dalam sesi tanya jawab, dan menunjukkan tanggung jawab akademik melalui kelengkapan atribusi sumber.			
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK				
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—

	<table><tr><td>Sub-CPMK6</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td><td>—</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>√</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Sub-CPMK6	—	—	√	—	Sub-CPMK7	—	—	—	√	Sub-CPMK8	—	—	—	√	Jumlah	2	2	2	2																																								
Sub-CPMK6	—	—	√	—																																																									
Sub-CPMK7	—	—	—	√																																																									
Sub-CPMK8	—	—	—	√																																																									
Jumlah	2	2	2	2																																																									
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																												
	<table><tr><td></td><td>CPL-02 (%)</td><td>CPL-03 (%)</td><td>CPL-09 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>4</td><td>3</td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>8</td><td>7</td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>7</td><td>7</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>27</td><td>63</td><td>10</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	8	7		15	2	Sub-CPMK2	4	3		7	1	Sub-CPMK3	8	7		15	2	Sub-CPMK4	7	7		14	2	Sub-CPMK5		14		14	2	Sub-CPMK6		14		14	2	Sub-CPMK7		7	7	14	2	Sub-CPMK8		4	3	7	1		27	63	10	100	14
	CPL-02 (%)	CPL-03 (%)	CPL-09 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																								
Sub-CPMK1	8	7		15	2																																																								
Sub-CPMK2	4	3		7	1																																																								
Sub-CPMK3	8	7		15	2																																																								
Sub-CPMK4	7	7		14	2																																																								
Sub-CPMK5		14		14	2																																																								
Sub-CPMK6		14		14	2																																																								
Sub-CPMK7		7	7	14	2																																																								
Sub-CPMK8		4	3	7	1																																																								
	27	63	10	100	14																																																								
Deskripsi Singkat MK																																																													
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran																																																													
Pustaka	Utama : (1) Pustaka Utama; (2) Rondinelli, D.A., Nellis, J.R., & Cheema, G.S. (1983). Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience. World Bank Staff Working Papers No. 581. World Bank; (3) Smith, B.C. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension of the State. George Allen & Unwin; (4) Turner, M., & Hulme, D. (1997). Governance, Administration and Development: Making the State Work. Macmillan; (5) Hooker, M.B. (1978). Adat Law in Modern Indonesia. Oxford University Press; (6) Mietzner, M. (2014). Indonesia's Decentralization: The Rise of Local Identities and the Survival of the Nation-State. dalam Hill, H. (Ed.), Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies;																																																												

		(7) Rasyid, M.R. (2002). Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya. Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.					
		Pendukung :					
Dosen Pengampu		Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.					
Modalitas dan Matakuliah prasyarat		Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta menelusuri landasan filosofis dan perkembangan historis hubungan pusat–daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak era kolonial hingga reformasi.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan perbedaan konseptual antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan berdasarkan tipologi Rondinelli et al. (1983) dengan ketepatan definisi pada masing-masing konsep - Mengidentifikasi landasan filosofis hubungan pusat–daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi konsep: mahasiswa membedakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan melalui skenario kasus singkat; dinilai berdasarkan ketepatan penerapan definisi teoritis dan kelengkapan argumentasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kuliah dengan pemaparan ringkas tipologi desentralisasi, dilanjutkan fasilitasi diskusi kelompok kecil (3–4 mahasiswa) membahas kasus historis yang telah dikaji daring; dosen menutup dengan sintesis dan klarifikasi konsep (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mendiskusikan peta konsep yang telah disiapkan, membandingkan temuan antarteman, dan menyempurnakan peta	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah slide pengantar, rekaman video penjelasan tipologi desentralisasi Rondinelli et al., dan dokumen UUD NRI 1945 Pasal 18–18B ke LMS UNISAN sebelum sesi tatap muka; menyediakan forum diskusi asinkron untuk pertanyaan awal mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan membaca bahan pada LMS, menelusuri	Bahan Kajian: - Tipologi desentralisasi: desentralisasi politik, administratif (dekonsentrasi), fiskal, dan tugas pembantuan; - Landasan filosofis hubungan pusat–daerah: Pasal 18, 18A, 18B UUD NRI 1945; - Perkembangan historis hubungan pusat–daerah: era kolonial Decentralisatiewet 1903 hingga awal kemerdekaan; Pustaka:	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Menelusuri tahapan perkembangan historis hubungan pusat–daerah dari era kolonial Belanda (Decentralisatiewet 1903) hingga awal kemerdekaan secara kronologis dan akurat - Membedakan karakteristik pola hubungan pusat–daerah pada masing-masing periode historis berdasarkan argumen dari sumber akademik yang valid	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan mengajukan pertanyaan atau tanggapan berbasis rujukan pustaka selama diskusi kelas; kejujuran akademik dalam menyebut sumber secara lisan (Integrity) Tugas: Peta konsep individual membedakan tiga konsep (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan) disertai satu paragraf refleksi hubungannya dengan konteks Indonesia; maksimal 1	konsep berdasarkan masukan kelompok serta arahan dosen MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: tiap kelompok mendiskusikan satu penggalan kasus historis (misalnya Decentralisatiewet 1903 versus UU No. 1/1945) untuk mengidentifikasi motif pemerintah pusat memilih mekanisme hubungan tertentu, lalu mempresentasikan temuan secara singkat di depan kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun peta konsep yang menggambarkan hubungan hierarkis dan perbedaan substansial antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas	teks Decentralisatiewet 1903 dan UUD 1945 melalui JDIH Digital, serta mengunggah peta konsep awal ke LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis skenario singkat satu kasus nyata kebijakan dekonsentrasi di era kolonial dan satu kasus tugas pembantuan pascakemerdekaan melalui forum daring, kemudian merumuskan pertanyaan diskusi untuk sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			halaman A4 + peta konsep	pembantuan, disertai satu paragraf refleksi tentang relevansi masing-masing konsep dalam konteks pemerintahan Indonesia pascakemerdekaan. Seluruh klaim wajib merujuk pada pustaka yang ditentukan; penggunaan AI generatif wajib disertai pernyataan transparansi sesuai Pedoman Etis UNISAN. Deliverable: Satu file PDF berisi peta konsep (minimal 3 node utama dengan relasi berlabel) dan satu paragraf refleksi (100–150 kata), dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi panel antara empat kelompok yang masing-masing mewakili satu periode regulasi (1974,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah matriks perbandingan UU No. 5/1974, UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, dan UU No.	Bahan Kajian: • Karakteristik sentralisasi pada era Orde Baru: UU No. 5/1974 dan kontrol pusat	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penilaian dilakukan melalui kualitas kontribusi dalam diskusi kelompok yang diukur dari ketepatan rujukan regulasi dan kedalaman argumentasi historis Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok dinilai dari kemampuan mengaitkan argumen dengan sumber pustaka secara eksplisit; menghargai perspektif antardaerah yang berbeda dalam diskusi (Harmony) Tugas:	1999, 2004, 2014); dosen memberikan umpan balik komparatif dan menegaskan benang merah perubahan paradigma hubungan pusat–daerah (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan karakteristik periode regulasi yang ditugaskan (5 menit per kelompok), diikuti tanya-jawab antarkelompok; mahasiswa menyempurnakan garis waktu berdasarkan diskusi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis panel regulasi: tiap kelompok menggunakan kasus konflik kewenangan yang telah dianalisis daring sebagai ilustrasi konkret perubahan paradigma regulasi, kemudian seluruh	23/2014 ke LMS; menyediakan tautan JDIH Digital ke teks lengkap keempat regulasi tersebut; membuka sesi tanya-jawab asinkron di forum LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca matriks perbandingan, menelusuri dokumen regulasi melalui JDIH Digital, dan mengisi template garis waktu yang disediakan dosen di LMS sebelum sesi luring; melanjutkan peta konsep Minggu 1 dengan menambahkan dimensi historis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara individual menganalisis satu kasus konflik kewenangan antara pusat	atas daerah; • Pergeseran paradigma desentralisasi pasca-reformasi 1998: UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004; • Dinamika identitas lokal dan kelangsungan negara-bangsa dalam proses desentralisasi Indonesia; • Gambaran awal UU No. 23/2014 sebagai penyempurnaan kerangka hubungan pusat–daerah; Pustaka: Mietzner (2014); Rasyid (2002); Turner & Hulme (1997); Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Garis waktu regulasi hubungan pusat–daerah 1974–2014 disertai anotasi singkat (2–3 kalimat per tonggak regulasi) menjelaskan perubahan substantif; maksimal 2 halaman A4 atau format infografis satu halaman	kelas menyimpulkan pola perubahan secara bersama-sama dipandu dosen Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun garis waktu perkembangan regulasi hubungan pusat–daerah di Indonesia dari UU No. 5/1974 hingga UU No. 23/2014, menandai setiap tonggak regulasi dengan anotasi singkat yang menjelaskan perubahan substantif dalam dimensi kewenangan atau struktur hubungan pusat–daerah. Mahasiswa juga menambahkan satu catatan penutup (100 kata) tentang relevansi perjalanan historis ini bagi daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia. Seluruh rujukan regulasi diperoleh melalui JDIH Digital dan dicantumkan secara jujur	dan daerah pada era Orde Baru versus era reformasi (kasus dipilih dari daftar yang disediakan dosen di LMS), lalu mengunggah ringkasan analisis 200 kata ke forum diskusi sebelum sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(Integrity). Deliverable: Satu file PDF berisi garis waktu beranotasi (minimal 5 tonggak regulasi, 2–3 kalimat per tonggak) dan catatan penutup (100 kata), dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 3			
3	Sub-CPMK2: Menguraikan kerangka normatif dan teori-teori utama hubungan pusat–daerah (teori residual, teori ultra vires, dan model otonomi seluas-luasnya) serta menghubungkannya dengan konstruksi konstitusional dan regulasi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan substansi teori residual, teori ultra vires, dan model otonomi seluas-luasnya beserta implikasi masing-masing terhadap distribusi kewenangan antara pusat dan daerah • Menghubungkan ketiga teori tersebut dengan konstruksi konstitusional Indonesia (Pasal 18 UUD NRI 1945) dan arsitektur regulasi	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis analisis teori: mahasiswa diberikan satu skenario penyelenggaraan pemerintahan daerah dan diminta mengidentifikasi teori mana yang paling tepat menjelaskannya serta memberikan argumentasi; dinilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan pemetaan singkat tiga teori di papan tulis, dilanjutkan fasilitasi debat terstruktur antara tiga kelompok yang masing-masing mempertahankan satu teori sebagai kerangka terbaik untuk Indonesia; dosen menutup dengan sintesis posisi normatif UU No. 23/2014 (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi bacaan inti tentang teori residual dan ultra vires (kutipan dari Smith 1985), catatan penjelasan model otonomi seluas-luasnya dalam konteks Indonesia, serta teks Pasal 18 UUD NRI 1945 dan penjelasan UU No. 23/2014 ke LMS; membuka forum diskusi tematik per teori (via LMS; sinkron/asinkron).	Bahan Kajian: • Teori residual dan teori ultra vires dalam hubungan pusat–daerah; • Model otonomi seluas-luasnya dan implementasinya dalam sistem pemerintahan Indonesia; • Konstruksi konstitusional Pasal 18, 18A, 18B UUD NRI 1945 sebagai basis normatif;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dasar (UU No. 23/2014) secara argumentatif • Membandingkan kekuatan dan kelemahan masing-masing teori dalam menjelaskan realitas hubungan pusat–daerah di Indonesia menggunakan kriteria akademik dari pustaka yang ditentukan • Mengidentifikasi landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan penelusuran dokumen konstitusi dan regulasi melalui JDIH Digital	berdasarkan ketepatan identifikasi teori dan kekuatan argumentasi normatif Partisipasi kelas & laboratorium: Kemampuan mempertahankan argumen teoretis dengan merujuk pustaka secara eksplisit dalam diskusi kelas; keterbukaan terhadap perspektif berbeda dari teman (Harmony) dan kejujuran dalam mengutip sumber (Integrity) Tugas: Esai analitis komparatif tiga teori (residual, ultra vires,	Mahasiswa menggunakan temuan analisis pasal dari sesi daring sebagai amunisi argumentasi dalam debat; menyempurnakan draf esai berdasarkan masukan dari debat kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis debat teoretis: tiap kelompok membangun argumen menggunakan contoh pasal konkret dari UU No. 23/2014 dan kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dikaji pada Minggu 1–2, sehingga diskusi bersifat kumulatif dan progresif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun esai analitis yang membandingkan teori	Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca materi yang diunggah, menelusuri teks UU No. 23/2014 melalui JDIH Digital untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang mencerminkan masing-masing teori, dan mengunggah catatan pra-diskusi (100 kata) ke forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara berpasangan menganalisis satu pasal UU No. 23/2014 dan menentukan teori mana yang paling tepat melandasi pasal tersebut, kemudian mendiskusikan hasilnya di forum daring sebelum dikonfirmasi saat luring	• Arsitektur regulasi dasar: UU No. 23/2014 dan kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pustaka: Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Rasyid (2002); Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			otonomi seluas-luasnya) dan kesesuaiannya dengan UU No. 23/2014; 400–500 kata, minimal 3 rujukan dari pustaka yang ditentukan	residual, teori ultra vires, dan model otonomi seluas-luasnya dari sudut pandang kesesuaiannya dengan konstruksi konstitusional dan regulasi dasar pemerintahan daerah di Indonesia. Esai harus menyertakan setidaknya satu contoh pasal UU No. 23/2014 sebagai ilustrasi tiap teori dan menyimpulkan teori mana yang paling dominan mewarnai sistem hukum pemerintahan daerah Indonesia saat ini. Seluruh sumber dikutip secara jujur dan dapat diverifikasi (Integrity); penggunaan AI generatif wajib disertai pernyataan transparansi. Deliverable: Satu file PDF esai analitis 400–500 kata (tidak termasuk daftar pustaka), minimal 3 rujukan dari pustaka yang ditentukan, dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 4	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4,5	Sub-CPMK3: Menganalisis pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014 dan perubahannya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor struktural penyebab ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur daerah di Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: • Menganalisis mekanisme pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan lampiran Matriks Pembagian Urusan UU No. 23/2014 menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi • Mengidentifikasi minimal tiga faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data Portal Kemendagri dan BPS Daerah • Membandingkan pola distribusi SDM aparatur daerah antara	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian dilakukan melalui kualitas laporan analisis kelompok yang diukur dari ketajaman identifikasi faktor struktural, akurasi data, dan kekuatan argumentasi kausal Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi substantif dalam kerja tim diukur dari kemampuan mengintegrasikan data empiris dengan argumen teoretis; kepedulian terhadap kondisi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi asistensi kelompok: tiap kelompok mempresentasikan draf temuan (5 menit) dan menerima umpan balik dari dosen serta kelompok lain; dosen menutup dengan penjelasan keterkaitan antara desain pembagian urusan dan disparitas kapasitas sebagai pengantar topik-topik berikutnya (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyempurnakan draf laporan berdasarkan umpan balik asistensi; mendiskusikan implikasi temuan terhadap rekomendasi kebijakan yang akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya (membangun kerangka untuk Minggu 5 dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan analisis Matriks Pembagian Urusan UU No. 23/2014, template laporan kelompok, dan tautan Portal Data Kemendagri serta BPS Daerah ke LMS; menyediakan video pengantar (10–15 menit) tentang konsep kriteria pembagian urusan konkuren (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa (dalam kelompok) menelusuri Matriks Pembagian Urusan pada JDIH Digital, mengunduh data kapasitas daerah dari Portal Kemendagri dan BPS, lalu mengisi template laporan draf pertama dan mengunggahnya ke LMS	Bahan Kajian: • Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren: kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi (UU No. 23/2014 dan lampirannya); • Tipologi urusan wajib pelayanan dasar, wajib non-pelayanan dasar, dan pilihan dalam UU No. 23/2014; • Faktor struktural ketimpangan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur daerah di Kawasan Timur Indonesia; • Data empiris disparitas kapasitas fiskal dan kelembagaan: perbandingan Kawasan Timur Indonesia dengan daerah lain;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		satu kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia dengan satu daerah di Jawa sebagai pembanding, menggunakan data empiris yang dapat diverifikasi • Merumuskan satu argumen analitis tentang hubungan kausal antara desain pembagian urusan konkuren dan disparitas kapasitas kelembagaan daerah, didukung pustaka akademik dan data sekunder	nyata daerah tertinggal di Kawasan Timur Indonesia sebagai basis analisis (Service); kemampuan menyesuaikan argumen dengan dinamika data terkini (Adaptability) Tugas: Laporan analisis kelompok (3–4 mahasiswa) tentang pembagian urusan konkuren dan ketimpangan kapasitas daerah di satu kabupaten/kota Kawasan Timur Indonesia; 600–800 kata, dilengkapi tabel data komparatif, minimal 2 rujukan pustaka dan 2	seterusnya) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning berbasis data empiris: kelompok menyajikan tabel komparatif data kapasitas daerah (jumlah ASN per kapita, alokasi APBD per urusan, indeks kapasitas fiskal) antara daerah studi di Kawasan Timur Indonesia dan daerah pembanding di Jawa, kemudian mendiskusikan faktor-faktor kausal yang teridentifikasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3–4 mahasiswa) menyusun laporan analisis yang menguraikan: (1) bagaimana urusan konkuren didistribusikan berdasarkan UU No.	sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tiap kelompok ditugaskan satu kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia (Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, atau Papua Barat) sebagai objek studi; kelompok mengumpulkan data sekunder dan mengidentifikasi faktor ketimpangan kapasitas secara daring sebelum dianalisis bersama saat luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Turner & Hulme (1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sumber data sekunder	23/2014 pada daerah studi yang ditentukan, (2) faktor-faktor struktural yang menyebabkan ketimpangan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pada daerah tersebut dibandingkan dengan daerah pembanding, dan (3) satu argumen analitis tentang kaitan antara desain pembagian urusan dan disparitas kapasitas. Data diperoleh dari Portal Kemendagri dan BPS Daerah; seluruh data dicantumkan sumbernya secara transparan (Integrity). Komitmen terhadap kondisi nyata masyarakat daerah harus tercermin dalam pembedingkaian masalah (Service dan Nationalism). Deliverable: Satu file PDF laporan analisis kelompok 600–800 kata, dilengkapi minimal satu tabel data komparatif, minimal 2 rujukan pustaka dari daftar			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang ditentukan dan 2 sumber data sekunder (Portal Kemendagri/BPS), dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 5			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat (15 menit) yang menguji ketepatan mahasiswa dalam mengklasifikasikan jenis urusan pemerintahan dan menyebutkan pembagian kewenangan antarstrata pemerintahan berdasarkan UU 23/2014; kriteria: ketepatan klasifikasi dan kelengkapan dasar hukum yang dikutip	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi pleno (30 menit) untuk mensintesis temuan forum daring, kemudian membagi mahasiswa ke dalam kelompok kecil (4-5 orang) untuk sesi Case-Based Learning terstruktur menggunakan kasus nyata pembagian urusan di daerah Kawasan Timur Indonesia; dosen memberikan umpan balik langsung pada akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa matriks yang telah disiapkan secara mandiri, mendiskusikannya dalam	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (15-20 menit) yang menjelaskan kerangka pembagian urusan konkuren berdasarkan UU 23/2014 beserta lampiran matriksnya, dan membuka forum diskusi asinkron di LMS UNISAN dengan pertanyaan pemantik tentang ketimpangan kapasitas kelembagaan di Kawasan Timur Indonesia (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dokumen UU 23/2014	Bahan Kajian: • Klasifikasi dan jenis urusan pemerintahan dalam UU 23/2014: absolut, konkuren wajib, dan pilihan; • Matriks pembagian urusan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; • Faktor struktural ketimpangan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur daerah; • Kondisi kapasitas pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok Case-Based Learning dinilai berdasarkan kualitas argumen analitis, kejujuran akademik dalam mengutip regulasi (mencerminkan nilai Integrity), dan penghargaan terhadap perspektif antardaerah dalam kelompok (mencerminkan nilai Harmony); skala 1-4 Tugas: Matriks analisis pembagian urusan konkuren: tabel yang memuat minimal 5 bidang urusan pilihan mahasiswa, diisi	kelompok untuk mengidentifikasi faktor struktural ketimpangan kapasitas, dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara singkat (5 menit per kelompok) di depan kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mengerjakan lembar analisis kasus pembagian urusan konkuren di daerah Kawasan Timur Indonesia yang dipilih, mengidentifikasi kesenjangan antara mandat regulasi dan kapasitas aktual kelembagaan, serta merumuskan pola faktor struktural yang ditemukan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara individual, mahasiswa menyusun	dari JDIH Digital, menelaah lampiran matriks pembagian urusan konkuren, menonton video pengantar, dan menjawab pertanyaan pemantik di forum LMS dengan menyertakan referensi minimal satu sumber pustaka yang valid MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menganalisis kasus satu daerah kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki keterbatasan kapasitas aparatur dalam melaksanakan urusan konkuren tertentu, kemudian mendiskusikan temuannya di forum asinkron LMS	• Hubungan antara distribusi kewenangan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kolom kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota, disertai identifikasi faktor ketimpangan kapasitas kelembagaan di satu daerah Kawasan Timur Indonesia; panjang narasi pendukung 400-600 kata	matriks analisis pembagian urusan konkuren di satu kabupaten/kota yang dipilih dari wilayah Kawasan Timur Indonesia. Matriks memuat minimal 5 bidang urusan, mencantumkan pembagian kewenangan pusat-provinsi-kabupaten/kota berdasarkan lampiran UU 23/2014, dan disertai narasi analitis yang mengidentifikasi minimal tiga faktor struktural penyebab ketimpangan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur di daerah tersebut. Penggunaan AI Generatif wajib disertai pernyataan transparansi dan hasil AI harus diverifikasi terhadap teks UU 23/2014 yang bersumber dari JDIH Digital. Deliverable: File PDF berisi: (1) matriks kewenangan 5 bidang urusan konkuren dalam format tabel, (2) narasi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				analitis 400-600 kata yang memuat identifikasi faktor struktural ketimpangan kapasitas dan referensi pustaka, serta (3) pernyataan integritas akademik; dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-6			
6,7	Sub-CPMK4: Menganalisis struktur hubungan keuangan pusat–daerah mencakup Dana Transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD, serta mengevaluasi tingkat ketergantungan fiskal daerah-daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia menggunakan data APBD aktual.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan mekanisme dan formula perhitungan DAU, DAK, dan DBH berdasarkan regulasi yang berlaku secara akurat • Membedakan karakteristik dan peruntukan DAU, DAK Fisik, DAK Non-Fisik, DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam secara tepat • Mengidentifikasi komponen-komponen PAD dan menganalisis	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Latihan perhitungan terstruktur (dikerjakan dalam kelompok di kelas): mahasiswa menghitung rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal dari data APBD yang disediakan dosen; kriteria: ketepatan formula, keakuratan perhitungan, dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memberikan penjelasan konseptual (30 menit) tentang formula DAU, DAK, DBH, dan komponen PAD menggunakan contoh data APBD daerah Sulawesi; kemudian dosen memfasilitasi sesi latihan perhitungan rasio fiskal berkelompok dan mendampingi diskusi interpretasi hasil perhitungan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul ringkas di LMS UNISAN yang menjelaskan kerangka hukum Dana Transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD, disertai panduan langkah-langkah mengakses dan mengunduh data APBD dari Portal Kemendagri dan BPS Daerah; dosen membuka sesi tanya jawab asinkron di forum LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Kerangka hukum hubungan keuangan pusat-daerah: DAU, DAK, DBH, dan PAD; • Formula dan mekanisme alokasi Dana Transfer dalam sistem desentralisasi fiskal Indonesia; • Komponen dan potensi PAD daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia; • Rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		potensi serta keterbatasan PAD daerah di Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data APBD aktual • Menghitung rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal satu daerah di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia menggunakan data APBD yang bersumber dari Portal Kemendagri atau BPS Daerah • Menganalisis pola distribusi Dana Transfer terhadap belanja daerah sebagai indikasi tingkat ketergantungan fiskal	interpretasi angka yang dihasilkan Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi pleno dan sesi analisis data dinilai berdasarkan ketepatan interpretasi data fiskal, kemampuan mengaitkan angka dengan kondisi nyata daerah Kawasan Timur Indonesia, dan kepedulian terhadap implikasi kebijakan bagi masyarakat daerah (mencerminkan nilai Service); skala 1-4 Tugas:	Mahasiswa membawa lembar kerja pra-kelas yang telah diisi, mengerjakan latihan perhitungan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal bersama kelompok menggunakan data APBD yang telah dikumpulkan, dan mendiskusikan interpretasi angka serta implikasinya terhadap kemampuan pelayanan publik daerah MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mulai membangun lembar kerja analisis fiskal komparatif yang akan menjadi bagian dari laporan akhir pada minggu ke-7; setiap kelompok mempresentasikan temuan awal perhitungan rasio fiskal daerah yang dipilih (5 menit per kelompok)	Mahasiswa membaca modul, mengakses Portal Kemendagri atau BPS Daerah untuk mengunduh data APBD daerah yang akan dianalisis, dan mengisi lembar kerja pra-kelas berupa rekapitulasi struktur pendapatan daerah sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara mandiri mengumpulkan data APBD aktual sebagai bahan dasar proyek analisis fiskal berkelanjutan yang akan disempurnakan pada minggu ke-7 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	sebagai indikator analisis; • Pembacaan dan interpretasi data APBD dari Portal Kemendagri dan BPS Daerah; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Lembar kerja analisis fiskal: tabel rekapitulasi struktur APBD satu daerah (minimal 2 tahun anggaran), disertai perhitungan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal serta interpretasi singkat 300-400 kata; sumber data wajib dicantumkan	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara berkelompok (4-5 orang), mahasiswa mengakses data APBD aktual minimal 2 tahun anggaran dari Portal Kemendagri atau BPS Daerah untuk satu daerah kabupaten/kota di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia. Kelompok menyusun lembar kerja analisis yang memuat rekapitulasi struktur pendapatan (rincian DAU, DAK, DBH, dan PAD), perhitungan rasio kemandirian fiskal dan rasio ketergantungan fiskal, serta interpretasi singkat mengenai pola fiskal daerah tersebut. Tugas ini bersifat formatif dan menjadi bahan dasar yang dikembangkan pada minggu ke-7.			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: File Excel atau PDF berisi: (1) tabel rekapitulasi struktur pendapatan APBD 2 tahun anggaran dengan sumber data yang dicantumkan, (2) tabel perhitungan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal, serta (3) interpretasi singkat 300-400 kata; dikumpulkan melalui LMS UNISAN sebelum pertemuan minggu ke-7			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes terpisah minggu ini; penilaian berpusat pada laporan analisis fiskal komparatif sebagai bentuk penilaian formatif lanjutan dari minggu ke-6; kualitas analisis dinilai berdasarkan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi laporan analisis fiskal komparatif (10 menit presentasi + 5 menit tanya jawab per kelompok), memberikan umpan balik substantif berbasis rubrik, dan memimpin diskusi pleno untuk mensintesis temuan lintas kelompok sebagai gambaran keseluruhan pola fiskal Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan laporan analisis fiskal komparatif di LMS UNISAN, termasuk rubrik penilaian laporan dan presentasi; dosen membuka sesi konsultasi asinkron untuk kelompok yang memerlukan umpan balik atas draft laporan sebelum presentasi luring (via LMS; sinkron/asinkron).	Bahan Kajian: • Analisis komparatif ketergantungan fiskal antardaerah di Kawasan Timur Indonesia; • Faktor struktural rendahnya PAD dan dominasi Dana Transfer dalam APBD daerah; • Implikasi ketergantungan fiskal terhadap otonomi dan kapasitas pelayanan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ketajaman argumentasi, ketepatan data, dan relevansi rekomendasi Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi kelompok dan kontribusi dalam sesi tanya jawab antarkelompok dinilai berdasarkan kemampuan mempertahankan argumen analitis berbasis data, kreativitas dalam merumuskan rekomendasi kebijakan (mencerminkan nilai Creativity), dan adaptabilitas dalam merespons pertanyaan yang mengacu pada dinamika regulasi	kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan laporan analisis fiskal komparatif mencakup profil fiskal dua daerah, perbandingan rasio ketergantungan, analisis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan; kelompok lain memberikan tanggapan kritis berbasis data MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi laporan proyek analisis fiskal komparatif diikuti diskusi kritis antarkelompok; dosen memandu sintesis temuan untuk membangun pemahaman bersama tentang ketergantungan fiskal sebagai isu struktural desentralisasi di Kawasan Timur Indonesia	Mekanisme & materi: Mahasiswa melanjutkan pengolahan data APBD dan menyempurnakan analisis rasio fiskal yang dimulai pada minggu ke-6, menyusun narasi analitis tentang faktor ketergantungan fiskal, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan literatur dan data yang dikumpulkan; kelompok mengunggah draft laporan ke LMS untuk umpan balik MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok menyelesaikan proyek analisis fiskal komparatif dengan mengintegrasikan data, teori desentralisasi fiskal, dan rekomendasi kebijakan berbasis potensi lokal Kawasan Timur Indonesia	publik daerah; • Strategi dan rekomendasi kebijakan penguatan kemandirian fiskal daerah; • Desentralisasi fiskal dalam konteks pembangunan daerah tertinggal; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			fiskal terkini (mencerminkan nilai Adaptability); skala 1-4 Tugas: Laporan analisis fiskal komparatif kelompok: memuat profil fiskal 2 daerah di Kawasan Timur Indonesia, tabel perbandingan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal, analisis faktor penyebab, dan rekomendasi kebijakan; panjang narasi 800-1000 kata di luar tabel dan daftar pustaka	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok menyempurnakan dan menyelesaikan laporan analisis fiskal komparatif yang dimulai pada minggu ke-6. Laporan memuat: (1) profil fiskal dua daerah kabupaten/kota di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia menggunakan data APBD aktual minimal 2 tahun anggaran, (2) tabel perbandingan rasio kemandirian dan ketergantungan fiskal antarkedua daerah, (3) analisis faktor struktural penyebab rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pada Dana Transfer, serta (4) minimal dua rekomendasi kebijakan konkret untuk penguatan kemandirian fiskal yang berpijak pada potensi lokal dan regulasi yang berlaku. Sumber data wajib berasal	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dari Portal Kemendagri atau BPS Daerah dan dicantumkan dengan jelas. Penggunaan AI Generatif wajib disertai pernyataan transparansi dan seluruh angka serta klaim regulasi wajib diverifikasi terhadap sumber primer. Nilai Service diwujudkan melalui rekomendasi yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat daerah, sementara nilai Nationalism diwujudkan melalui perspektif yang memandang kemandirian fiskal daerah sebagai pilar ketahanan negara-bangsa. Deliverable: File PDF laporan analisis fiskal komparatif (800-1000 kata narasi di luar tabel dan daftar pustaka) yang memuat profil fiskal, tabel perbandingan rasio, analisis faktor, dan rekomendasi kebijakan; disertai file data Excel sebagai lampiran; dikumpulkan melalui LMS			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				UNISAN pada hari pelaksanaan pertemuan minggu ke-7 sebelum sesi presentasi dimulai			
8		Mahasiswa mampu: - Menjelaskan konsep dan tipologi desentralisasi serta kerangka teoritis hubungan pusat-daerah secara akurat dan terstruktur - Menganalisis pembagian urusan pemerintahan konkuren dan implikasinya terhadap kapasitas kelembagaan daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan UU 23/2014 - Mengevaluasi struktur hubungan keuangan pusat-daerah mencakup Dana Transfer dan PAD serta menginterpretasikan data fiskal daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Tengah Semester tertulis (90-100 menit) mencakup materi minggu 1-7; format soal terdiri dari soal analisis kasus dan soal esai pendek; kriteria penilaian meliputi ketepatan konseptual, kemampuan menganalisis menggunakan kerangka teori yang tepat, kualitas argumentasi, dan ketepatan pengutipan regulasi; kisi-kisi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membagikan soal UTS tertulis, memastikan tata tertib ujian ditegakkan, dan memberikan penjelasan singkat mengenai petunjuk pengerjaan soal sebelum ujian dimulai; dosen mengawasi jalannya ujian selama durasi yang ditetapkan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UTS tertulis secara mandiri selama durasi yang ditetapkan; jawaban ditulis tangan di lembar jawaban resmi yang disediakan; setelah pengumpulan, dosen memberikan gambaran singkat mengenai materi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah pengumuman resmi pelaksanaan UTS di LMS UNISAN mencakup cakupan materi, format soal, dan tata tertib ujian; dosen membuka sesi tanya jawab singkat (forum LMS) untuk klarifikasi materi paling lambat H-2 sebelum UTS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses pengumuman UTS dan ringkasan kisi-kisi materi di LMS UNISAN, melakukan review mandiri terhadap materi minggu 1-7 termasuk modul, catatan, lembar kerja analisis, dan	Bahan Kajian: - Review konsep dan tipologi desentralisasi (materi minggu 1-4); - Pembagian urusan pemerintahan konkuren dan kapasitas kelembagaan daerah (materi minggu 5); - Struktur Dana Transfer (DAU, DAK, DBH) dan PAD dalam sistem desentralisasi fiskal (materi minggu 6-7); - Analisis ketergantungan fiskal daerah Kawasan Timur Indonesia (materi minggu 7); - Integrasi kerangka teoritis hubungan pusat-daerah dalam analisis	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		secara tepat • Mengintegrasikan konsep-konsep dari minggu 1-7 untuk menganalisis persoalan nyata hubungan pusat-daerah dalam kasus yang disajikan • Menunjukkan kejujuran akademik dalam pengerjaan ujian tertulis dengan tidak melakukan kecurangan dan menjawab secara mandiri (mencerminkan nilai Integrity)	disusun mengacu pada Sub-CPMK 1 hingga Sub-CPMK 4 Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak ada komponen partisipasi pada sesi UTS; seluruh penilaian bersumber dari jawaban ujian tertulis; ketertiban dan kejujuran dalam pelaksanaan ujian dinilai sebagai bagian dari sikap akademik Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu UTS; mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dan membawa alat	yang akan dibahas pada paruh kedua semester MP — Metode Pembelajaran: Ujian tertulis individual: soal berbasis kasus dan esai pendek yang mengukur kemampuan analisis dan integrasi konsep hubungan pusat-daerah dari minggu 1-7 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada tugas terstruktur pada minggu UTS. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri secara mandiri dengan mereview seluruh materi dari minggu 1-7, termasuk konsep desentralisasi, pembagian urusan konkuren berdasarkan UU 23/2014, serta kerangka hubungan keuangan pusat-daerah dan analisis ketergantungan fiskal yang telah	laporan yang telah dikumpulkan MP — Metode Pembelajaran: Review mandiri berbasis LMS: mahasiswa menyusun ringkasan konsep secara mandiri sebagai persiapan UTS, tanpa metode SCL kolaboratif pada minggu ini Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	kasus pemerintahan daerah Indonesia; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			tulis serta kartu identitas mahasiswa yang valid	dikerjakan dalam laporan kelompok. Deliverable: Lembar jawaban UTS tertulis yang diserahkan langsung kepada dosen pada akhir sesi ujian			
9,10	Sub-CPMK5: Mengevaluasi mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah—mencakup pengawasan preventif, represif, dan fungsional—melalui studi kasus sengketa kewenangan atau pembatalan peraturan daerah di lingkup Sulawesi, dan menghasilkan laporan analisis kritis.	Mahasiswa mampu: • Mengklasifikasikan tiga bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah (preventif, represif, fungsional) beserta dasar hukum masing-masing dalam sistem UU 23/2014 • Membandingkan mekanisme pengawasan preventif dan represif berdasarkan perbedaan objek, waktu, dan akibat hukumnya terhadap peraturan daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat tertulis (10 soal pilihan ganda + 2 soal uraian pendek): menguji kemampuan mengklasifikasikan jenis pengawasan dan mengidentifikasi dasar hukumnya; kriteria: ketepatan klasifikasi (40%), ketepatan rujukan regulasi (40%), kejelasan penalaran (20%)	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi kuliah interaktif (50 menit) yang membahas kerangka tipologi pengawasan, dilanjutkan sesi tanya-jawab; kemudian memandu diskusi kelompok (50 menit) di meja diskusi kelompok menggunakan kasus pembatalan perda yang telah ditelaah secara daring (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan temuan awal peta konsep dalam kelompok kecil (3–4 orang), memberikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan (30–40 menit) tentang kerangka konseptual dan tipologi pengawasan pusat–daerah, dilengkapi slide anotasi dan tautan dokumen regulasi dari JDIH Digital; membuka forum diskusi tematik di LMS untuk respons mahasiswa (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video dan slide, mengakses dokumen UU 23/2014 Pasal 373–392 melalui JDIH Digital,	Bahan Kajian: • Tipologi pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah: preventif, represif, dan fungsional; • Dasar hukum pengawasan dalam UU 23/2014 (Pasal 373–392) dan peraturan pelaksanaannya; • Kelembagaan pengawasan: Kemendagri, BPKP, dan Inspektorat Daerah; • Alur prosedural pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Menganalisis peran lembaga pengawas fungsional (Kemendagri, BPKP, Inspektorat) dalam struktur hubungan hierarkis pusat–daerah • Mengevaluasi kesesuaian prosedur pengawasan yang diterapkan terhadap suatu kasus pembatalan perda dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku • Menyusun peta konsep tertulis yang menggambarkan alur pengawasan pusat terhadap daerah secara sistematis dan akurat	Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelas berbasis kasus pengawasan: dinilai dari frekuensi kontribusi substantif, ketepatan argumen berdasarkan regulasi, dan penghargaan terhadap perspektif rekan (nilai Harmony dan Integrity) Tugas: Peta konsep pengawasan pusat–daerah: diagram alur lengkap tiga mekanisme pengawasan disertai dasar hukum dan	umpan balik antar-kelompok, lalu merevisi peta konsep berdasarkan masukan sebelum pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis alur pengawasan pada kasus nyata pembatalan perda di Sulawesi menggunakan dokumen regulasi dan data JDIH; setiap kelompok menyimpulkan jenis pengawasan yang diterapkan dan menilai kesesuaiannya dengan UU 23/2014 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun peta konsep yang memetakan tiga mekanisme pengawasan pemerintah pusat terhadap	menjawab pertanyaan pemantik di forum LMS, dan mengumpulkan draf peta konsep awal sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa diberikan ringkasan satu kasus pembatalan perda di lingkup Sulawesi (disediakan dosen) sebagai bahan analisis awal secara mandiri sebelum diskusi tatap muka Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	pusat; • Kerangka teoritis pengawasan dalam sistem desentralisasi; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			contoh kasus, disajikan dalam 1 lembar A3 atau dokumen digital setara, dikumpulkan via LMS SIAK-NG	daerah (preventif, represif, fungsional), mencakup: definisi tiap mekanisme, dasar hukum (minimal menyebut pasal dalam UU 23/2014), lembaga pelaksana, dan satu contoh ilustrasi per mekanisme. Peta konsep harus menunjukkan hubungan hierarkis dan alur prosedural secara visual. Mahasiswa yang menggunakan alat bantu AI wajib melampirkan pernyataan transparansi penggunaan dan menunjukkan bukti verifikasi terhadap regulasi dan pustaka akademik. Deliverable: Satu file peta konsep (format PDF atau gambar resolusi tinggi, setara 1 lembar A3) diunggah ke LMS SIAK-NG sebelum sesi luring Minggu 10, disertai pernyataan keaslian dan (bila relevan) pernyataan transparansi penggunaan AI			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas laporan analisis kritis sebagai bukti capaian evaluatif (C5) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan umpan balik antar-kelompok: dinilai dari kedalaman pertanyaan/kritik yang diajukan, kemampuan mempertahankan argumen berdasarkan data dan regulasi, serta	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi kelompok (tiap kelompok 10–12 menit presentasi + 5 menit tanya jawab); memberikan umpan balik terstruktur mengacu pada rubrik; merangkum temuan lintas kasus dan mengaitkan dengan isu kapasitas daerah di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan laporan analisis kritis kelompok, merespons pertanyaan dari kelompok lain dan dosen, mencatat umpan balik, dan merevisi laporan sebelum pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan laporan analisis kritis beserta rubrik penilaian rinci di LMS; menyediakan tautan ke sumber data kasus (JDIH, berita resmi, dokumen Kemendagri) terkait kasus pembatalan perda atau sengketa kewenangan di Sulawesi; membuka sesi konsultasi daring (live chat atau forum) untuk umpan balik draf laporan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok mengakses dan menelaah dokumen kasus yang disediakan, menelusuri regulasi terkait melalui JDIH Digital, menyusun draf laporan secara kolaboratif, dan	Bahan Kajian: • Studi kasus sengketa kewenangan pusat–daerah di lingkup Sulawesi; • Prosedur dan implikasi hukum pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah pusat; • Evaluasi dampak pengawasan terhadap otonomi dan kapasitas daerah; • Metodologi penulisan laporan analisis kritis kebijakan desentralisasi; • Rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan mekanisme pengawasan; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sikap menghargai keberagaman perspektif antardaerah (nilai Harmony dan Nationalism) Tugas: Laporan analisis kritis kelompok (3–4 orang): minimal 1.500 kata, mencakup deskripsi kasus, identifikasi mekanisme pengawasan, evaluasi kesesuaian prosedur, analisis dampak, dan rekomendasi berbasis regulasi; dilengkapi daftar pustaka dan pernyataan integritas akademik	Case-Based Learning: sesi panel presentasi kasus — kelompok berperan sebagai analis kebijakan yang memaparkan temuan evaluasi pengawasan kepada forum kelas, mendorong pemikiran kritis berbasis bukti regulasi dan konteks lokal Sulawesi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3–4 mahasiswa) menyusun laporan analisis kritis tentang satu kasus sengketa kewenangan atau pembatalan perda di lingkup Sulawesi. Laporan mencakup: (1) deskripsi kronologis kasus, (2) identifikasi jenis pengawasan yang diterapkan berdasarkan tipologi Minggu 9, (3) evaluasi kesesuaian prosedur pengawasan dengan UU 23/2014, (4)	mengunggah draf awal untuk umpan balik dosen sebelum finalisasi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setiap kelompok mendalami satu kasus yang sama atau berbeda (sesuai pembagian dosen) — misal kasus pembatalan perda investasi di Sulawesi Tenggara atau sengketa kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah — dan menganalisisnya secara sistematis menggunakan kerangka tipologi pengawasan dari Minggu 9 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(1997); Mietzner (2014); Rasyid (2002).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				analisis dampak terhadap otonomi dan kapasitas daerah, dan (5) rekomendasi perbaikan mekanisme pengawasan yang spesifik dan terukur. Mahasiswa wajib mengutip sumber regulasi dan pustaka secara benar (nilai Integrity). Penggunaan AI wajib disertai pernyataan transparansi dan bukti verifikasi mandiri terhadap regulasi. Deliverable: Laporan analisis kritis kelompok dalam format PDF (minimal 1.500 kata, tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran), diunggah ke LMS SIAK-NG paling lambat tiga hari setelah sesi luring, disertai lembar pernyataan integritas akademik yang ditandatangani seluruh anggota kelompok dan (bila relevan) pernyataan transparansi penggunaan AI			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11,12	Sub-CPMK6: Mengevaluasi tata kelola pemerintahan desa dan hubungan desa–daerah–pusat, mencakup implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa, melalui studi kasus nyata pada desa-desa di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia dengan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan komunitas lokal.	Mahasiswa mampu: - Menjelaskan posisi desa dalam struktur hubungan desa–daerah–pusat berdasarkan UU 6/2014 tentang Desa dan keterkaitannya dengan UU 23/2014 - Menganalisis mekanisme penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sebagai instrumen fiskal dalam hubungan vertikal pusat–desa - Membandingkan model tata kelola BUMDes yang berhasil dan yang mengalami kendala di desa-desa Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data empiris	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian berbasis diskusi kasus dan draf awal laporan studi kasus desa Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi kasus desa: dinilai dari kemampuan menghubungkan data empiris dengan kerangka regulasi, kepedulian terhadap kebutuhan nyata komunitas desa (nilai Service), dan penghargaan terhadap keberagaman kondisi antardesa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memberikan kuliah interaktif (50 menit) tentang kerangka konseptual tata kelola desa dan hubungan desa–daerah–pusat; memfasilitasi sesi diskusi kelompok (50 menit) untuk presentasi pilihan desa studi kasus dan rencana analisis; memberikan umpan balik substantif terhadap kelayakan dan relevansi kasus yang dipilih (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan profil awal desa studi kasus kelompok masing-masing (5–7 menit per kelompok), mendapatkan umpan balik dari dosen dan kelompok lain, menyesuaikan fokus analisis berdasarkan masukan, dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi video (30–40 menit) yang memaparkan kerangka regulasi tata kelola desa (UU 6/2014, PP 43/2014, Permendes), mekanisme Dana Desa, dan profil BUMDes dari beberapa desa di Sulawesi; menyediakan dataset ringkas Dana Desa dari Portal Kemendagri dan BPS Daerah untuk Kawasan Timur Indonesia; membuka forum diskusi untuk analisis data awal (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video dan materi, mengakses data Dana Desa dari Portal Kemendagri dan BPS Daerah untuk mengidentifikasi satu	Bahan Kajian: - Kedudukan dan fungsi desa dalam sistem hubungan desa–daerah–pusat berdasarkan UU 6/2014; - Mekanisme penyaluran dan pengelolaan Dana Desa sebagai instrumen fiskal vertikal; - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): model, fungsi, dan kondisi di Kawasan Timur Indonesia; - Musyawarah desa sebagai mekanisme demokrasi deliberatif dan perencanaan partisipatif; - Kapasitas kelembagaan desa dan tantangan implementasi kebijakan pusat di tingkat desa; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Menganalisis fungsi musyawarah desa sebagai mekanisme demokrasi deliberatif dalam perencanaan pembangunan desa sesuai prinsip tata kelola partisipatif • Mengidentifikasi permasalahan implementasi Dana Desa yang berdampak pada komunitas lokal dan mengaitkannya dengan kapasitas kelembagaan desa	di Kawasan Timur Indonesia (nilai Harmony) Tugas: Profil awal studi kasus desa: dokumen 600–800 kata per kelompok berisi identifikasi desa yang dikaji, gambaran umum implementasi Dana Desa/BUMDes/musyawarah desa, sumber data yang digunakan, dan rencana analisis untuk Minggu 12; dikumpulkan via LMS SIAK-NG sebelum sesi luring Minggu 12	memfinalisasi rencana pengerjaan laporan untuk Minggu 12 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: sesi konsultasi proyek studi kasus — kelompok memaparkan desa pilihan, sumber data, dan kerangka analisis yang akan digunakan; dosen dan kelas memberikan umpan balik untuk mempertajam fokus dan memastikan relevansi terhadap isu tata kelola nyata komunitas lokal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3–4 mahasiswa) memilih satu desa nyata di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia sebagai objek studi kasus tata kelola desa. Pada tahap ini,	desa studi kasus di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia, mendiskusikan temuan awal di forum LMS, dan menyusun draf profil awal studi kasus MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: setiap kelompok memilih satu desa nyata di Sulawesi atau Kawasan Timur Indonesia sebagai proyek studi kasus yang akan dikembangkan hingga Minggu 12; tahap ini berfokus pada pengumpulan data dan pemetaan kondisi awal desa Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Turner & Hulme (1997); Rasyid (2002); Mietzner (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kelompok menyusun profil awal yang mencakup: (1) identitas dan gambaran umum desa (lokasi, jumlah penduduk, potensi lokal), (2) gambaran implementasi Dana Desa tiga tahun terakhir berdasarkan data Portal Kemendagri atau BPS, (3) keberadaan dan kondisi BUMDes (jika ada), (4) praktik musyawarah desa yang teridentifikasi dari sumber yang tersedia, dan (5) rencana analisis kritis yang akan dikembangkan pada Minggu 12. Mahasiswa didorong menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan nyata komunitas desa (nilai Service) dalam pemilihan kasus dan sudut analisis. Deliverable: Dokumen profil awal studi kasus desa dalam format PDF (600–800 kata, tidak termasuk tabel data dan daftar sumber), diunggah ke LMS SIAK-NG			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sebelum sesi luring Minggu 12			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian difokuskan pada kualitas laporan studi kasus dan presentasi sebagai bukti capaian evaluatif (C5) dan afektif (A3 — menampilkan kepedulian terhadap kebutuhan komunitas lokal) Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas presentasi dan diskusi: dinilai dari kedalaman analisis yang disampaikan, kemampuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi studi kasus (tiap kelompok 12–15 menit presentasi + 8 menit tanya jawab dan umpan balik); mengajukan pertanyaan pendalaman untuk menguji ketajaman analisis dan relevansi rekomendasi; merangkum temuan lintas studi kasus dan mengidentifikasi pola umum serta keunikan tata kelola desa di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan laporan studi kasus desa secara panel di depan kelas, merespons pertanyaan kritis dari dosen dan kelompok lain, memberikan umpan balik	BP — Mekanisme kuliah: Dosen menyediakan rubrik penilaian laporan dan presentasi studi kasus di LMS; mengunggah contoh laporan studi kasus tata kelola desa dari konteks Kawasan Timur Indonesia sebagai referensi standar; membuka konsultasi daring untuk finalisasi laporan; menyediakan panduan refleksi nilai Service dan Creativity dalam laporan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa memfinalisasi laporan studi kasus berdasarkan profil awal (Minggu 11) dan umpan balik dosen; menyiapkan bahan presentasi (slide atau	Bahan Kajian: • Evaluasi efektivitas implementasi Dana Desa: realisasi anggaran, program, dan dampak komunitas; • Kinerja BUMDes: transparansi, akuntabilitas, dan faktor keberhasilan atau kegagalan di Kawasan Timur Indonesia; • Musyawarah desa sebagai forum deliberatif: partisipasi, representasi, dan kearifan lokal Sulawesi; • Dinamika hubungan desa–daerah–pusat: koordinasi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan; • Perumusan rekomendasi kebijakan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menjawab pertanyaan kritis, kepedulian yang ditunjukkan terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa (nilai Service), dan kreativitas rekomendasi kebijakan (nilai Creativity); penghargaan terhadap perspektif antardesa dinilai melalui kualitas umpan balik yang diberikan kepada kelompok lain (nilai Harmony) Tugas: Laporan studi kasus tata kelola desa: dokumen tertulis minimal 2.000 kata (tidak termasuk tabel, lampiran, dan daftar pustaka)	konstruktif kepada kelompok yang mempresentasikan, dan mencatat sintesis temuan lintas kasus yang akan berguna untuk perancangan rekomendasi kebijakan pada tahap berikutnya MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: sesi panel presentasi proyek — kelompok berperan sebagai konsultan kebijakan yang memaparkan hasil evaluasi tata kelola desa dan rekomendasi kepada forum kelas; mendorong refleksi kolektif tentang keberagaman kondisi desa di Kawasan Timur Indonesia dan komitmen bersama terhadap penguatan komunitas lokal Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	media visual); mengunggah laporan final ke LMS sesuai tenggat; anggota kelompok membaca laporan kelompok lain (yang diunggah dosen secara anonim) untuk persiapan umpan balik MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tahap finalisasi dan presentasi proyek studi kasus desa — kelompok mengintegrasikan data empiris, analisis regulasi, dan perspektif kebutuhan komunitas lokal ke dalam laporan komprehensif dan materi presentasi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	inovatif untuk penguatan tata kelola desa konteks lokal; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Turner & Hulme (1997); Hooker (1978); Rasyid (2002); Mietzner (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mencakup lima komponen: deskripsi desa, evaluasi Dana Desa, evaluasi BUMDes/musyawarah desa, analisis hubungan desa–daerah–pusat, dan rekomendasi kebijakan; disertai minimal satu tabel atau grafik data; dikumpulkan via LMS SIAK-NG	Tugas: Kelompok (3–4 mahasiswa) menyusun laporan studi kasus tata kelola desa yang komprehensif berdasarkan desa yang dipilih sejak Minggu 11. Laporan mencakup: (1) deskripsi kontekstual desa (geografi, demografi, potensi, tantangan), (2) evaluasi implementasi Dana Desa: realisasi anggaran, jenis program yang didanai, dan dampak yang teridentifikasi terhadap komunitas, (3) evaluasi BUMDes atau musyawarah desa: kinerja, partisipasi komunitas, dan kesesuaian dengan regulasi, (4) analisis hubungan desa–daerah–pusat: pola koordinasi, kendala, dan dinamika kewenangan yang ditemukan, (5) rekomendasi kebijakan inovatif dan kontekstual yang merespons kebutuhan nyata komunitas desa			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(nilai Service dan Creativity). Seluruh klaim empiris harus dikaitkan dengan sumber data yang terverifikasi. Penggunaan AI wajib disertai pernyataan transparansi dan bukti verifikasi mandiri. Nilai Nationalism diwujudkan dengan memaknai penguatan desa sebagai bagian dari ketahanan negara-bangsa. Deliverable: Laporan studi kasus tata kelola desa dalam format PDF (minimal 2.000 kata, tidak termasuk tabel, lampiran, dan daftar pustaka), disertai slide presentasi (format PDF atau PPTX), lembar pernyataan integritas akademik yang ditandatangani seluruh anggota, dan (bila relevan) pernyataan transparansi penggunaan AI; semua file diunggah ke LMS SIAK-NG paling lambat pada hari pelaksanaan sesi luring Minggu 12			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13,14	Sub-CPMK7: Merancang rekomendasi kebijakan penguatan hubungan pusat–daerah secara kolaboratif dalam tim lintas perspektif, dengan mengintegrasikan analisis urusan, fiskal, pengawasan, dan tata kelola desa ke dalam satu dokumen kebijakan yang koheren dan kontekstual terhadap kebutuhan Kawasan Timur Indonesia.	Mahasiswa mampu: - Merancang kerangka dokumen rekomendasi kebijakan yang memuat minimal empat dimensi analisis (urusan pemerintahan, fiskal daerah, pengawasan, dan tata kelola desa) secara terintegrasi - Mengintegrasikan temuan analisis minggu-minggu sebelumnya ke dalam satu narasi kebijakan yang koheren dan tidak saling kontradiktif antarsubbagian - Menyusun identifikasi masalah spesifik Kawasan Timur Indonesia berdasarkan data empiris dari Portal Kemendagri atau BPS Daerah sebagai basis	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas draf dokumen kebijakan yang dihasilkan tim Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi diskusi kelompok dinilai dari frekuensi dan substansi kontribusi argumen, kemampuan menghargai perbedaan perspektif antartim, serta konsistensi sikap jujur dan kolaboratif	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi workshop penyusunan DRK di kelas dengan meja diskusi kelompok, memberikan umpan balik langsung per tim selama 10-15 menit, dan memimpin sesi pleno singkat untuk mengidentifikasi isu lintas kelompok yang perlu disinkronkan (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa bekerja dalam tim di kelas untuk mengintegrasikan subbagian dokumen, mengisi process log, dan merespons umpan balik dosen dengan merevisi bagian yang lemah secara argumentatif MP — Metode Pembelajaran:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penyusunan DRK ke LMS UNISAN, membuka forum diskusi asinkron untuk konsultasi draf antarkelompok, dan memberikan umpan balik tertulis pada outline yang diunggah tiap tim sebelum sesi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh panduan DRK, menelusuri regulasi terkait melalui JDIH Digital, mengakses data fiskal DAU/DAK Kawasan Timur Indonesia dari Portal BPS Daerah, dan mengunggah outline draf untuk mendapatkan umpan balik dosen	Bahan Kajian: - Kerangka integrasi analisis urusan, fiskal, pengawasan, dan tata kelola desa dalam dokumen kebijakan; - Prinsip perancangan rekomendasi kebijakan yang kontekstual terhadap Kawasan Timur Indonesia; - Dimensi kolaborasi tim lintas perspektif dalam proses penyusunan kebijakan desentralisasi; - Atribusi sumber dan integritas akademik dalam penulisan dokumen kebijakan publik; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rekomendasi • Mengorganisasi pembagian peran tim lintas perspektif secara proporsional dengan memperlihatkan harmoni kerja kelompok dalam catatan proses (process log) • Menunjukkan atribusi sumber yang jujur dan lengkap pada setiap klaim normatif maupun empiris dalam draf dokumen kebijakan	selama workshop berlangsung Tugas: Draf awal Dokumen Rekomendasi Kebijakan (DRK) minimal 10 halaman, memuat: latar belakang masalah Kawasan Timur Indonesia, analisis empat dimensi (urusan, fiskal, pengawasan, desa), dan rancangan rekomendasi terstruktur; disertai process log tim (1-2 halaman); dikumpulkan melalui LMS UNISAN akhir pekan ke-13	Project-Based Learning dengan Case-Based Learning: kelompok menggunakan kasus nyata daerah di Kawasan Timur Indonesia (misalnya kabupaten di Sulawesi, Maluku, atau Papua) sebagai konteks konkret rekomendasi, kemudian mengintegrasikan analisis kasus tersebut ke dalam DRK Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap tim (4-5 mahasiswa lintas perspektif) menyusun draf awal Dokumen Rekomendasi Kebijakan yang mengintegrasikan empat dimensi analisis hubungan pusat-daerah ke dalam satu dokumen koheren. Dokumen wajib berbasis data empiris Kawasan Timur Indonesia, mencantumkan atribusi sumber sesuai pedoman	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tiap tim menyusun outline DRK secara kolaboratif daring menggunakan dokumen bersama (shared document), kemudian mendiskusikan pembagian subbab dan konsistensi argumen melalui forum LMS UNISAN sebelum workshop luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	(1997); Rasyid (2002); Mietzner (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				integritas akademik, dan dilengkapi process log yang mendokumentasikan kontribusi tiap anggota tim. Penggunaan alat bantu AI Generatif diperbolehkan sebagai bahan awal dengan wajib menyertakan pernyataan transparansi penggunaan dan verifikasi terhadap regulasi serta pustaka akademik. Deliverable: Draf awal DRK (minimal 10 halaman, format PDF) mencakup: (1) latar belakang masalah berbasis data Kawasan Timur Indonesia, (2) analisis empat dimensi terintegrasi, (3) rancangan rekomendasi terstruktur dengan justifikasi regulatif dan akademis, (4) daftar pustaka, dan (5) process log tim (1-2 halaman); diunggah ke LMS UNISAN			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas DRK final yang dikumpulkan sebagai produk integrasi seluruh analisis semester Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi peer review dinilai dari kualitas umpan balik yang diberikan kepada kelompok lain (substansif, berbasis argumen, menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi peer review terstruktur antarkelompok di kelas, setiap kelompok mempresentasikan rekomendasi utama mereka dalam 7-10 menit, kemudian menerima umpan balik dari satu kelompok reviewer yang ditunjuk; dosen merangkum pola kelemahan umum dan kekuatan yang ditemukan lintas kelompok pada akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berperan bergantian sebagai presenter dan reviewer, mencatat umpan balik yang diterima, dan langsung mendiskusikan dalam tim bagian mana dari DRK yang perlu direvisi sebelum	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi konsultasi daring terjadwal via LMS UNISAN, mengunggah rubrik penilaian DRK final agar mahasiswa dapat melakukan penilaian mandiri (self-assessment) terhadap draf mereka, dan memberikan umpan balik tertulis akhir pada dokumen yang diunggah (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melakukan revisi draf berdasarkan umpan balik tertulis dosen dari minggu ke-13, menggunakan rubrik penilaian untuk self-assessment, menelusuri regulasi tambahan via JDIH Digital bila diperlukan, dan mengunggah versi revisi	Bahan Kajian: • Teknik penyusunan ringkasan eksekutif dokumen kebijakan publik; • Standar koherensi dan konsistensi argumentasi dalam dokumen rekomendasi kebijakan desentralisasi; • Peer review sebagai mekanisme pengendalian kualitas dokumen kebijakan akademis; • Rekomendasi kebijakan berbasis kapasitas kelembagaan dan fiskal daerah Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Rasyid (2002);	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			perspektif), serta respons adaptif terhadap masukan yang diterima Tugas: Dokumen Rekomendasi Kebijakan final minimal 15 halaman, memuat: ringkasan eksekutif (1-2 halaman), latar belakang, analisis empat dimensi yang telah direvisi, rekomendasi terstruktur beserta justifikasi, daftar pustaka lengkap, dan pernyataan transparansi penggunaan AI (bila digunakan); dikumpulkan melalui LMS UNISAN akhir pekan ke-14	pengumpulan final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan peer review berbasis rubrik: kelompok saling menilai menggunakan lembar rubrik yang sama dengan yang akan dipakai dosen, sehingga mahasiswa menginternalisasi standar kualitas dokumen kebijakan sambil mengembangkan kemampuan evaluasi kritis Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap tim menyelesaikan dan mengumpulkan Dokumen Rekomendasi Kebijakan final sebagai produk puncak semester. Dokumen harus menunjukkan integrasi yang mulus antara analisis urusan pemerintahan,	untuk persiapan sesi peer review luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tim bekerja secara mandiri daring untuk menyelesaikan revisi substantif, dengan mekanisme kontrol kualitas internal tim sebelum sesi peer review luring dilaksanakan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Mietzner (2014); Hooker (1978).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sebagai produk UAS kelompok	desentralisasi fiskal, mekanisme pengawasan, dan tata kelola desa dalam konteks Kawasan Timur Indonesia. Rekomendasi harus bersifat operasional, realistis secara kelembagaan dan fiskal, serta didukung oleh argumentasi regulatif dan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Service dan Nationalism tercermin pada orientasi rekomendasi terhadap kebutuhan nyata masyarakat daerah dan penguatan integrasi nasional. Deliverable: Dokumen Rekomendasi Kebijakan final (minimal 15 halaman, format PDF) mencakup: (1) ringkasan eksekutif 1-2 halaman, (2) latar belakang dan identifikasi masalah berbasis data Kawasan Timur Indonesia, (3) analisis empat dimensi terintegrasi yang telah direvisi, (4) rekomendasi			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kebijakan terstruktur dengan justifikasi regulatif dan akademis, (5) daftar pustaka lengkap dengan format yang konsisten, dan (6) pernyataan transparansi penggunaan AI Generatif apabila digunakan; diunggah ke LMS UNISAN			
15	Sub-CPMK8: Mempresentasikan dan mempertahankan rekomendasi kebijakan penguatan hubungan pusat–daerah secara sistematis, mengomunikasikan argumen dengan jelas, menghargai perbedaan sudut pandang dalam sesi tanya jawab, dan menunjukkan tanggung jawab akademik melalui kelengkapan atribusi sumber.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan rekomendasi kebijakan secara sistematis dengan alur logis dari identifikasi masalah, analisis, hingga rekomendasi operasional dalam waktu yang ditentukan • Mengomunikasikan argumen kebijakan dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan dapat dipahami audiens akademis maupun non-akademis	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tulis; penilaian dilakukan melalui rubrik presentasi yang mencakup empat dimensi: (1) sistematika dan kejelasan alur argumen, (2) kedalaman substansi rekomendasi, (3) kualitas pertahanan argumentasi saat tanya jawab, dan (4) kelengkapan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen bertindak sebagai moderator dan penilai utama sesi presentasi; setiap kelompok mendapat alokasi waktu presentasi 15 menit dan tanya jawab 10 menit; dosen memberikan umpan balik lisan singkat (3-5 menit) setelah setiap kelompok selesai tampil; sesi diakhiri dengan sintesis dosen tentang pola rekomendasi dan kekuatan argumentasi yang menonjol lintas kelompok (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah jadwal presentasi per kelompok, rubrik penilaian presentasi, dan panduan etika bertanya dalam sesi tanya jawab akademis ke LMS UNISAN; mahasiswa dapat mengakses umpan balik tertulis dosen terhadap DRK final sebagai bahan persiapan presentasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyiapkan slide presentasi	Bahan Kajian: • Teknik komunikasi kebijakan publik dalam forum deliberatif; • Pertahanan argumentasi berbasis regulasi dan data empiris; • Etika akademik dalam presentasi dan diskusi lintas perspektif; • Sintesis rekomendasi kebijakan desentralisasi untuk penguatan hubungan pusat-daerah; Pustaka:	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Mempertahankan rekomendasi kebijakan dari pertanyaan dan sanggahan peserta dengan argumen yang didukung data dan regulasi yang diacu dalam DRK • Menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan sudut pandang selama sesi tanya jawab melalui respons yang mendengarkan, tidak defensif, dan terbuka terhadap perspektif alternatif • Menyertakan atribusi sumber yang lengkap dan akurat pada slide presentasi sebagai wujud tanggung jawab akademik dan integritas intelektual	atribusi sumber pada slide Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan sebagai audiens dinilai dari kualitas pertanyaan atau tanggapan yang diajukan kepada kelompok lain: pertanyaan harus substantif, berbasis materi yang dipresentasikan, dan disampaikan dengan sikap menghargai; serta kemampuan menerima perbedaan perspektif secara konstruktif Tugas: Slide presentasi final (10-15 slide, format PDF atau	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan DRK final secara lisan di depan kelas, mempertahankan argumen saat tanya jawab dari audiens dan dosen, serta berperan aktif sebagai audiens yang mengajukan pertanyaan substantif kepada kelompok lain MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan simulasi forum kebijakan publik: kelas dikondisikan sebagai ruang deliberasi kebijakan di mana setiap kelompok berposisi sebagai tim penyusun kebijakan yang mempertanggungjawabkan rekomendasi mereka kepada forum, sehingga melatih kemampuan komunikasi, pertahanan argumentasi, dan penghargaan terhadap	berdasarkan DRK final yang telah direvisi, berlatih presentasi dalam tim, dan menelaah kembali regulasi serta data yang akan digunakan sebagai argumen pertahanan saat tanya jawab MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: tim secara mandiri mengonversi dokumen kebijakan menjadi narasi presentasi yang ringkas dan komunikatif, dengan pembagian peran presentasi yang disepakati bersama sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Rasyid (2002); Mietzner (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			PowerPoint) yang mencakup ringkasan masalah, pokok analisis empat dimensi, rekomendasi utama, dan daftar pustaka; dikumpulkan via LMS UNISAN sebelum sesi presentasi dimulai	pluralitas perspektif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap tim mempresentasikan Dokumen Rekomendasi Kebijakan final di depan kelas dalam format simulasi forum kebijakan publik. Presentasi harus mencerminkan integrasi seluruh analisis yang telah dibangun sepanjang semester, dikomunikasikan secara jelas dan sistematis, serta dipertahankan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nilai Integrity tercermin pada kelengkapan atribusi sumber; Harmony pada sikap dalam merespons perbedaan perspektif; Creativity pada inovasi rekomendasi; dan Nationalism pada orientasi rekomendasi terhadap penguatan hubungan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pusat-daerah sebagai pilar ketahanan negara-bangsa. Deliverable: Slide presentasi final (10-15 slide, format PDF atau PowerPoint) yang memuat ringkasan masalah, analisis empat dimensi, rekomendasi utama beserta justifikasi, dan daftar pustaka; dikumpulkan via LMS UNISAN sebelum jadwal presentasi kelompok masing-masing			
16		Mahasiswa mampu: - Menyelesaikan seluruh rangkaian evaluasi akhir semester sesuai dengan jadwal dan ketentuan akademik yang berlaku - Menunjukkan kejujuran akademik dan kemandirian selama pelaksanaan ujian akhir semester	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester dilaksanakan sesuai ketentuan akademik UNISAN; cakupan materi meliputi seluruh Sub-CPMK semester dengan penekanan pada kemampuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengawasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester sesuai prosedur akademik UNISAN; memastikan kondisi ujian yang tertib, adil, dan kondusif bagi seluruh mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal Ujian Akhir Semester	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memastikan seluruh nilai tugas dan capaian Sub-CPMK telah diinput ke SI-OBE UNISAN; membuka akses rekap nilai dan umpan balik akhir bagi mahasiswa melalui LMS UNISAN setelah proses penilaian selesai (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: Seluruh bahan kajian Mata Kuliah Hubungan Pusat dan Daerah semester berjalan sebagai cakupan Ujian Akhir Semester; Pustaka: Rondinelli, Nellis, & Cheema (1983); Smith (1985); Turner & Hulme (1997); Hooker (1978);	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			analisis dan sintesis hubungan pusat-daerah; bentuk soal dan pelaksanaan mengikuti panduan ujian yang ditetapkan program studi Partisipasi kelas & laboratorium: Kehadiran dan ketertiban selama pelaksanaan ujian akhir semester sesuai tata tertib ujian UNISAN Tugas: Tidak ada tugas tambahan pada minggu ini; penilaian dilakukan melalui instrumen ujian akhir semester yang disiapkan terpisah oleh dosen pengampu	secara mandiri dan jujur sesuai tata tertib ujian yang berlaku di UNISAN Gorontalo MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif individual: pengerjaan soal ujian akhir semester secara tatap muka yang mencakup kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi konsep hubungan pusat-daerah sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan baru pada minggu ini. Minggu ke-16 sepenuhnya dialokasikan untuk pelaksanaan Ujian Akhir Semester sebagai evaluasi sumatif penutup seluruh rangkaian pembelajaran	Mahasiswa mempersiapkan diri untuk ujian akhir dengan menelaah kembali seluruh materi, regulasi, dan temuan analisis yang telah dipelajari sepanjang semester; dapat mengakses ringkasan materi yang telah diunggah dosen di LMS UNISAN MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif: ujian akhir semester sebagai instrumen pengukuran ketercapaian seluruh CPMK secara individual Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Rasyid (2002); Mietzner (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mata Kuliah Hubungan Pusat dan Daerah. Deliverable: Lembar jawaban Ujian Akhir Semester yang dikerjakan secara mandiri dan jujur sesuai tata tertib ujian UNISAN			

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri, **P**=Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	10	
2	Kuis	10	
3	UTS	20	
4	Proyek Kebijakan	40	
5	UAS	20	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis	UTS	Proyek Kebijakan	UAS	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	5	4	—	—	9
Sub-CPMK2	—	5	4	—	—	9
Sub-CPMK3	3	—	3	—	—	6
Sub-CPMK4	3	—	3	—	—	6
Sub-CPMK5	2	—	—	—	10	12
Sub-CPMK6	2	—	—	—	10	12
Sub-CPMK7	—	—	3	20	—	23
Sub-CPMK8	—	—	3	20	—	23
Bobot Komponen (%)	10	10	20	40	20	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas:

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1			
RENCANA TUGAS MAHASISWA				
MATA KULIAH	Hubungan Pusat Dan Daerah			
KODE	3KKBP209	sks	3	SEMESTER 4
DOSEN PENGAMPU	Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.			
METODE PENUGASAN				
JUDUL TUGAS				
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
DISKRIPSI TUGAS				
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)				

LANGKAH Pengerjaan Tugas	
Bentuk dan Format Luaran	
Indikator, Kreteria dan Bobot Penilaian	
Jadwal Pelaksanaan	
Lain-lain	
Daftar Rujukan	

5.1 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.2 Kuis (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 Proyek Kebijakan

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Kebijakan			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi

3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.5 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.